

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan dalam dunia bisnis meningkat tajam di era ekonomi modern berbasis pengetahuan (*knowledge economy*), hal ini mendorong manajemen perusahaan bersaing untuk memperoleh *Competitif Advantage* dengan cara memperhatikan kinerja perusahaan. Penilaian dan pengukuran kinerja perusahaan merupakan salah satu faktor penting karena dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan sistem imbalan seperti gaji karyawan dan *reward*, selain itu oleh pihak manajemen dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah diterapkan serta kebijakan untuk periode selanjutnya. Sedangkan oleh pihak investor, informasi yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan sangat bermanfaat untuk melihat prospek perusahaan dimasa depan, sehingga investor dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi dengan baik.

Salah satu cara yang ditempuh agar tetap mampu bersaing adalah dengan pengelolaan *Intangible Asset* secara maksimal, *Intellectual Capital* menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk menentukan, mengukur dan menilai *Intangible Assets* tersebut. Saat ini di era ekonomi berbasis pengetahuan, *Intellectual Capital* semakin diterima sebagai salah satu faktor

penting dalam menciptakan keuntungan perusahaan yang berkelanjutan, meningkatkan profitabilitas perusahaan dan efisiensi biaya. Mengembangkan modal intelektual tak kalah pentingnya dibanding investasi modal bagi perusahaan. Oleh karena itu, modal intelektual harus semakin dikenal sebagai salah satu investasi utama untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan perusahaan, bersamaan dengan faktor produksi lainnya.¹

Fenomena mengenai *intellectual capital* di Indonesia mulai berkembang terutama sejak diterbitkannya PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 19 (revisi 2000) yang membahas tentang aktiva tidak berwujud. Menurut PSAK No. 19, aktiva tidak berwujud adalah aktiva *nonmoneter* yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik serta dimanfaatkan guna menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Namun, pelaporan mengenai *intellectual capital* atau modal intelektual belum dikenal secara luas karena proses akuntansi serta penyajiannya yang ada sekarang terkesan dikembangkan untuk perusahaan manufaktur dan perdagangan yang kurang mencakup seluruh kegiatan perusahaan. Padahal banyak kegiatan perusahaan yang didasarkan pada pengetahuan, keahlian, maupun teknologi.²

¹ Zeinab Rezaei dan Zahra Mousavi, "The Impact of Intellectual Capital on The Performance of Islamic Banking", *Indian Journal of Fundamental and Applied LifeSciences*, Vol.5 (SI), 2015, hal. 1806.

² Fierda Shofa, "Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia", *Skripsi Program Sarjana FEB UNDIP*, 2014, hal.160-161.

Sudah banyak peneliti yang mengembangkan model untuk mengukur dan mengungkapkan nilai *Intellectual capital*, para peneliti mengidentifikasi tiga konstruk utama dari *Intellectual capital*, yaitu: *Human Capital*, *Structural Capital*, dan *Customer capital*. Model yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah model pengukuran *intellectual capital* untuk perbankan syariah yang dikembangkan oleh Ulum yaitu pendekatan iB VAIC (*Islamic Banking Value Added Intellectual Coefficient*). iB VAIC secara umum hampir sama dengan model yang di desain oleh pulic 1997 yaitu VAIC (*Value Added Intellectual Coefficient*), namun disini terdapat perbedaaan dalam hal akun-akun dalam laporan keuangan yang digunakan untuk menghitung nilai *Intellectual Capital*, karena penyajian laporan keuangan antara perbankan syariah dengan bank konvensional berbeda.³

Penelitian ini menggunakan sektor perbankan syari'ah karena sektor perbankan merupakan sektor industri yang berbasis pengetahuan dan memiliki orientasi kepada kualitas produk jasa atau layanan kepada para nasabahnya, selain itu industri disektor perbankan adalah yang termasuk dalam 4 industri yang memiliki tingkat pengaruh *intellectual capital* tertinggi (*intensive industry sector*) dan dari aspek intelektual secara keseluruhan karyawan di sektor perbankan lebih homogen dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Disisi

³ Ihyaul Ulum, "iB-VAIC: Model Pengukuran Kinerja Intellectual Capital Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Inferensi*, Volume 7, No 1, 2013, hal. 8-9.

lain bank syariah dalam Undang-Undang Dasar No. 21 tahun 2008 adalah sebuah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar arus lalulintas pembayaran. Prinsip yang mendasari usaha perbankan adalah kepercayaan dari masyarakat luas. Oleh karena itu, faktor manusia didalam bisnis perbankan tersirat memprediksi kinerja keuangan dengan modal intelektual menjadi semakin kental.⁴

Pemilihan perbankan syari'ah juga dikarenakan perkembangan bank berbasis prinsip syari'ah di Indonesia kini tengah mengalami kemajuan yang pesat. Data dari Statistik Perbankan Syariah OJK (Otoritas Jasa Keuangan) satu tahun terakhir hingga bulan Juli 2017 (yoy) menunjukkan perbankan syariah di Indonesia mampu tumbuh hingga $\pm 19,62\%$ dengan total asset sebesar Rp378.569 triliun. Total pembiayaan telah disalurkan mencapai Rp184.275 triliun dan total penghimpunan dana menjadi Rp282.080 triliun. Perbankan syari'ah di Indonesia memerlukan strategi yang tepat dalam mengkomunikasikan produk dan layanan perbankan syari'ah ke masyarakat.

BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) sebagai bagian dari lembaga perbankan syariah yang beroperasi disegmen mikro pun mengalami

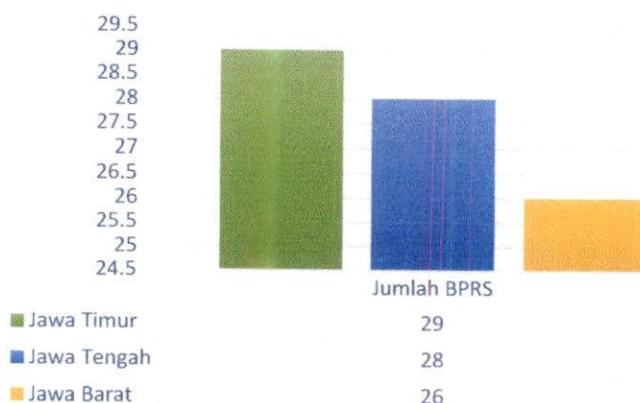
⁴ Dwie Santi Lestari, "Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangann Perbankan Syari'ah di Indonesia", *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, No.80/ DIKTI/kep/2012, hal. 347-348.

perkembangan yang cukup menggembirakan. Aset BPRS selama kurun waktu satu tahun terakhir meningkat menjadi sebesar Rp9.911.899 juta rupiah (yoy), dengan share pembiayaan merupakan 77,68% dari total aktiva. Penghimpunan dana BPRS juga meningkat tinggi yaitu sebesar Rp6.268.626 juta rupiah. BPRS telah menjalankan fungsi intermediasi perbankan dengan baik, tercermin dari rasio FDR (*Financing to Deposit Rato*) agregat BPRS yang mencapai 119,59%. Pertumbuhan penyaluran dana tersebut cukup terkendali dengan kualitas pembiayaan yang baik dengan penurunan rasio NPF (*Non Performing Financing*) dari 10,99% menjadi 10,78%. Rasio permodalan BPRS cukup memadai yang tercermin dari agregat rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang tinggi mencapai 20,69%.⁵

Walaupun dilihat dari rasio-rasio kinerja BPRS yang mengalami peningkatan, namun BPRS masih mengalami hambatan dan beberapa tantangan yang harus di hadapi. Terkait dengan sumber daya manusia, modal, manajemen, termasuk kebijakan pemerintah yang menjadi tantangan BPRS yaitu penurunan suku bunga kredit menjadi single digit, penyaluran KUR dengan bunga 9%, kewajiban penyaluran kredit UMKM oleh bank umum dan laku pandai. Oleh karena itu agar BPRS tetap mampu bertahan dan bersaing dengan BUS atau lembaga keuangan lain, BPRS harus memiliki keunggulan

⁵ Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Statistika Perbankan Syariah Juli 2017*. Dalam format PDF. Perbankan Syariah OJK. Jakarta: Desember 2017. Diakses pada 2/10/2017 pukul 16.03 wib

kompetitif. Salah satu strategi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif adalah mengelola IC (*Intellectual Capital*) dengan baik.

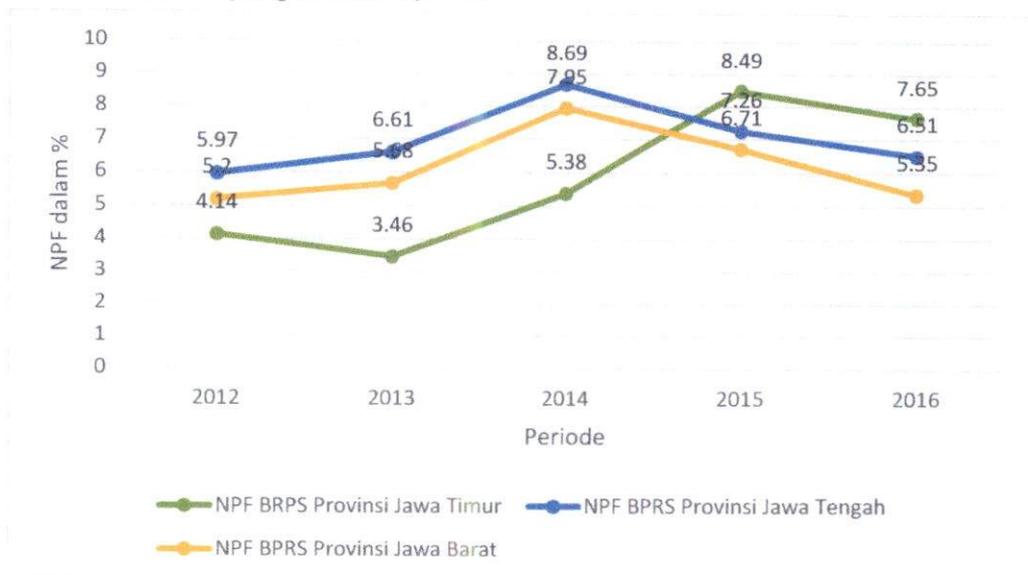


Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK 2017

Grafik 1.1
Jumlah BPRS berdasarkan Provinsi

Salah satu provinsi di pulau Jawa yang memiliki jumlah BPRS terbanyak adalah provinsi Jawa Timur dengan jumlah 29 BPRS, dibandingkan dengan provinsi Jawa Barat dan Jawa tengah yang jumlah BPRS nya lebih sedikit. Jawa barat ada 28 BPRS yang beroperasi dan di Jawa tengah ada 26 BPRS. Total aset BPR Syariah di seluruh Jawa Timur pada akhir triwulan III tahun 2017 tercatat sebesar Rp1,69 triliun, dengan pangsa mencapai 6,37% dari total aset perbankan syariah di Jawa Timur. Selanjutnya, pembiayaan yang disalurkan oleh BPR Syariah di Jawa Timur sebagian merupakan pembiayaan produktif dengan pangsa mencapai 52,61%. Namun demikian, pangsa tersebut masih

lebih kecil dibandingkan dengan pangsa kredit produktif BPR Konvensional yang mencapai sebesar 70,16%. Namun BPR Syariah di Jawa Timur harus lebih berupaya meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan, karena data menunjukkan bahwa risiko kredit BPR Syariah di Jawa Timur cenderung meningkat pada triwulan III tahun 2017 dengan rasio NPF sebesar 10,02%, lebih tinggi dibandingkan rasio NPL (*Non Performing Loan*) BPR Konvensional yang sebesar 8,04%.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK 2017

Grafik 1.2

NPF berdasarkan Provinsi

Dari data diatas dapat terlihat tren nilai NPF BPRS di Jawa Timur selalu naik setiap tahunnya, NPF tertinggi terjadi pada tahun 2015 yang mencapai hingga 8,49%, menurut peraturan BI nilai NPF sebesar 10,02% berada pada peringkat ke tiga, padahal untuk mencapai peringkat satu nilai NPF harus lebih

kecil atau sama dengan 7%. Nilai NPF tersebut menggambarkan bahwa BPRS di Jawa timur memiliki proporsi pembiayaan bermasalah yang cukup tinggi.

Penelitian ataupun kajian mengenai aspek-aspek modal intelektual pada perusahaan perbankan terutama Bank Umum telah banyak dilakukan. Oleh karena itu, peneliti memilih sektor perbankan dengan ruang lingkup operasionalnya disegmen mikro untuk menambah ruang lingkup kajian. Peneliti memilih objek penelitiannya adalah BPRS karena dapat mewakili harapan peneliti. Diketahui data bahwa BPRS yang beroperasi di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan dalam jumlah aset, namun dalam hal penyaluran pembiayaan masih kalah dengan BPR Konvensional, proporsi pembiayaan bermasalahnya (NPF) pun masih cukup tinggi, hal tersebut menggerakkan penulis untuk meneliti keterkaitan *Intellectual Capital* terhadap kinerja keuangan BPRS di provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka disini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS PENGARUH *INTELLECTUAL CAPITAL* TERHADAP KINERJA KEUANGAN BPRS DI PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2012-2016".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap tingkat Profitabilitas (ROA) BPRS di provinsi Jawa Timur periode 2012-2016?
2. Apakah *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap tingkat permodalan (CAR) BPRS di provinsi Jawa Timur periode 2012-2016?
3. Apakah *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) BPRS di provinsi Jawa Timur periode 2012-2016?
4. Apakah *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap tingkat Efisiensi (BOPO) BPRS di provinsi Jawa Timur periode 2012-2016?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Intellectual Capital* terhadap tingkat Profitabilitas (ROA) BPRS di provinsi Jawa Timur periode 2012-2016
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Intellectual Capital* terhadap tingkat permodalan (CAR) BPRS di provinsi Jawa Timur periode 2012-2016

3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Intellectual Capital* terhadap tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) BPRS di provinsi Jawa Timur periode 2012-2016
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Intellectual Capital* terhadap tingkat Efisiensi (BOPO) BPRS di provinsi Jawa Timur periode 2012-2016

D. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Teoritik

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber dan sarana guna memperluas wawasan mengenai pentingnya *Intellectual Capital* sebagai asset tak berwujud yang harus dimiliki perusahaan dan mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja keuangan BPRS di Indonesia.

2. Aspek Praktis

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan untuk lembaga keuangan syariah khususnya di segmen mikro agar lebih menghargai serta memperhatikan asset tak berwujud yaitu *Intellectual Capital*, sebagai salah satu asset yang penting dalam sebuah perusahaan yang dapat digunakan untuk memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan. Serta sebagai bahan kajian dan referensi untuk mengembangkan aspek-aspek strategis BPRS terutama dalam aspek peningkatan mutu sumber daya manusia.